

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, PT.Grafindo Persada, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, PT Sofmedia, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Laporan Potensi Sumber Daya Ikan Nasional Tahun 2024*, Jakarta, BRIN Press, 2024.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), *Kajian Praktik Ilegal Penangkapan BBL di Wilayah Selatan Jawa*. Jakarta, KKP Press, 2024
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Hadji, M, *Model Penegakan Hukum Terpadu di Sektor Kelautan Indonesia*, Jurnal Hukum Maritim, Vol. 12. No. 1, 2024.
- Herlien Budiono, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Maritim*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Statistik Kelautan dan Perikanan Nasional 2023*, Jakarta, KKP, 2024
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. M. Khozim), Bandung, Nusa Media, 2019
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian*

*Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya, Laksbang, 2018.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Belaku di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Askara Baru, 2018.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Transnasional*, Bandung, Refika Aditama, 2020.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Fenomenologi*, Jakarta, Kencana, 2021.

Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2018.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2023

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2018.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* Jakarta, Gunung Agung, 2017

\_\_\_\_\_, *Manajemen Modern*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016

Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung, Remadja Karya, 2018.

#### **B. Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan**

Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) 1939 Stbl.1939.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

#### **C. Sumber Lain**

Andre Putra Rumegang, *Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres Ri No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan*

*Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), Lex et Societatis, Vol. IV. No. 2, 2016.*

Hidayat, A, *Budaya Hukum Masyarakat Pesisir dalam Penegakan Hukum Perikanan, Jurnal Hukum Laut Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2021*

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/TentaraNasionalIndonesiaAngkatanLaut>, di akses 20 Februari 2026

Junior Hecta, Imam Munajat Nurhartonosuro, Muhadi, *Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 2, 2024*

Putri Awin Susanti Zamili, Indra Yudha Koswara, *Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1. No. 2, 2022.*

Temaluru and Arman, *Efektivitas Kebijakan Hukum Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perairan Perbatasan Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8 No. 7, 2024.*